

TATA KELOLA DESA WISATA BINANGA KARAENG

RURAL TOURISM MANAGEMENT IN BINANGA KARAENG

Misni^{1,*} Muzdalifah Muhamadun², Rusnaena³

¹ Program Studi Pariwisata Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare, Jl. Amal Bhakti Soreang, Kota Parepare, 91131, Indonesia.

² Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare, Jl. Amal Bhakti Soreang, Kota Parepare, 91131, Indonesia.

³ Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare, Jl. Amal Bhakti Soreang, Kota Parepare, 91131, Indonesia

E-mail: misni@iainpare.ac.id, muzdalifahmuhammadun@iainpare.ac.id, rusnaena@iainpare.ac.id

Abstrack

Binanga Karaeng Tourism has the potential to be developed into a Sharia tourism destination in Pinrang Regency. With a variety of objects and natural beauty that it has and a large area that is the attraction of the tourist itself. This study discusses the Governance of Binanga Karaeng Tourism Village as a Sharia tourism destination. The purpose of this study is to determine the tourism potential, governance and analysis of sharia tourism in Binanga Karaeng Tourism Village in Lembang reviewed from a Sharia Perspective. The type of research used is qualitative using a phenomenological approach. The data collection techniques are in the form of observation, interviews, and documentation. The focus of this study is the Potential and Governance of Tourism Villages. The results of this study indicate that Binanga Karaeng tourism regarding its potential, this beach has potential starting from nature/marine such as the standing of coconut trees in each tour and man-made such as the availability of gazebo and cafes, the potential of the tourism village in Binanga Karaeng in Lembang can be said to have the potential as sharia tourism because in terms of infrastructure such as the availability of prayer rooms at several tourist points, surrounding sellers and services using hijab and providing halal drinks. Meanwhile, for the governance in the Binanga Karaeng Tourism Village, namely (1). The form of related participation is government involvement and community involvement, (2). Involvement of all stakeholders, the role of stakeholders is needed to optimize the implementation of tourism development, one of the stakeholders involved in tourism development is the government, private sector and community, (3). Local ownership partnership, partnerships carried out by the local government such as entrusting tourism support equipment to several business actors and businesses to be rented to tourists, (4). Sustainable utilization of resources, including the utilization of human resources, natural resources, cultural resources, (5). Accommodating the aspirations of local communities, local communities are given space to do business in their own areas so that it is very profitable for those who sell food and drinks, then create attractions such as banana boats for visitors who come to visit, (6). Environmental carrying capacity.

Keywords: management; rural tourism; sharia tourism

Abstrak

Wisata Binanga Karaeng memiliki potensi untuk di kembangkan menjadi destinasi wisata Syariah di Kabupaten Pinrang. Dengan beraneka ragam objek dan keindahan alam yang dimilikinya serta kawasan yang luas yang menjadi daya tarik wisata itu sendiri. Penelitian ini membahas tentang Tata Kelola Desa Wisata Binanga Karaeng sebagai destinasi wisata Syariah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui potensi wisata,tata kelola dan analisis wisata syariah Desa Wisata Binanga Karaeng Di Lembang di tinjau Perspektif Syariah. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi, Adapun teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun fokus penelitian ini adalah Potensi dan Tata Kelola Desa Wisata.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wisata Binanga Karaeng mengenai potensinya, pantai ini memiliki potensi mulai dari alam/bahari seperti berdirinya pohon kelapa di setiap wisata dan buatan manusianya seperti tersedianya gazebo dan cafe, potensi desa wisata di Binanga Karaeng Di Lembang ini bisa dikatakan berpotensi sebagai wisata syariah karena ditinjau dari segi infrastruktur seperti tersedianya mushollah di beberapa titik wisata, penjual sekitar serta pelayanan menggunakan hijab dan menyediakan minuman halal. Sedangkan untuk Tata kelola yang ada di desa Wisata Binanga Karaeng yaitu (1). Bentuk partisipasi terkait yaitu keterlibatan pemerintah dan keterlibatan masyarakat, (2). Keterlibatan segenap pemangku kepentingan, peran pemangku kepentingan dibutuhkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan kepariwisataan, salah satu pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan kepariwisataan yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat, (3). Kemitraan kepemilikan lokal, kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah daerah seperti penitipan alat-alat penunjang pariwisata kepada beberapa pelaku usaha dan bisnis untuk disewakan kepada wisatawan, (4). Pemanfaatan sumber daya secara berlanjut, meliputi pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya budaya, (5). Mengakomodasikan aspirasi masyarakat lokal, masyarakat lokal diberikan ruang untuk berbisnis di kawasannya sendiri sehingga sangat menguntungkan bagi mereka yang menjual makanan dan minuman, kemudian membuat atraksi seperti banana boot bagi para pengunjung yang datang berwisata, (6). Daya dukung lingkungan.

Kata Kunci: manajemen; desa wisata; pariwisata Ssariah

1. Pendahuluan

Pariwisata secara umum dapat diartikan menjadi holistik kegiatan pemerintahan, global usaha dan masyarakat untuk mengatur setiap rangkaian kegiatan yang diselenggarakan secara perorangan atau gerombolan pada negaranya atau negaralain menggunakan kemudahan, jasa dan sektor penunjang lainnya yang disediakan sang pemerintah atau masyarakat sehingga bisa menciptakan serta mewujudkan keinginan wisatawan.

Undang-undang tentang kepariwisataan mendefinisikan pariwisata sebagai berbagai macam hal yang berhubungan dengan aktivitas wisata serta didukung banyak fasilitas serta layanan/jasa yang disediakan oleh pihak-pihak terkait seperti rakyat, pengusaha, pemerintah juga pemerintah daerah. Keberadaan potensi pariwisata yang unik dan menarik di suatu wilayah seharusnya bisa dimanfaatkan melalui pengembangan pariwisata yang baik.¹

Sejak tahun 1978, pemerintah terus berusaha untuk mengembangkan kepariwisataan. Hal ini dituangkan pada TAP MPR No. IV/MPR/1978, yaitu bahwa pariwisata perlu ditingkatkan serta diperluas untuk mempertinggi penerimaan devisa,

¹Khusnul Khotimah, dkk. *Strategi Pengembangan Destinasi Pariwisata Budaya* (Studi Kasus pada Kawasan Situs Trowulan sebagai Pariwisata Budaya Unggulan di Kabupaten Mojokerto), (Malang: Fakultas Ilmu Administrasi UB, 2017), h. 57.

memperluas lapangan kerja serta memperkenalkan kebudayaan. Pelatihan serta pengembangan pariwisata dilakukan dengan permanen memperhatikan terpeliharanya kebudayaan dan kepribadian nasional. Untuk itu perlu diambil langkah-langkah dan pengaturan-pengaturan yang lebih terarah sesuai kebijaksanaan yang terpadu, diantaranya bidang kenaikan pangkat, penyediaan fasilitas serta mutu dan kelancaran pelayanan.²

Pengembangan tata kelola destinasi pariwisata termasuk desa wisata yang terdapat pada Sulawesi Selatan sendiri termasuk di Kabupaten Pinrang ini belum dilakukan secara optimal. Dari berbagai permasalahan yang nyata yang mempengaruhi perkembangan pariwisata seperti halnya masih dalam keadaan tidak optimalnya tata kelola, termasuk kurangnya kemampuan respon, pariwisata masih cenderung bersifat parsial, kurangnya pengemasan produk pariwisata termasuk pengemasan produk kuliner, rendahnya SDM serta pelayanan umum, terbatasnya promosi, serta belum sejalan antara regulasi di tingkat daerah untuk investasi dan pembinaan industri pariwisata.

Pengembangan Obyek Serta Daya Tarik Wisata (ODTW) yang artinya penggerak utama sektor kepariwisataan membutuhkan kerjasama semua pemangku kepentingan yang terdiri dari warga dan pemerintah, kerjasama eksklusif dari kalangan usaha maupun dari pihak swasta. Daya tarik dalam obyek wisata ialah salah satu modal utama yang harus dimiliki dalam upaya peningkatan serta pengembangan obyek dan daya tarik wisata. Keberadaan obyek dan daya tarik wisata artinya mata rantai terpenting dalam suatu aktivitas wisata, hal ini disebabkan karena faktor utama yang membuat pengunjung atau wisatawan untuk mengunjungi daerah tujuan wisata adalah potensi serta daya tarik yang dimiliki obyek wisata tersebut.³

Di Sulawesi Selatan sendiri, sebelumnya Kabupaten Pinrang belum tercatat adanya desa wisata setelah akhirnya terdapat dua desa di Kabupaten Pinrang mendaftarkan diri mengikuti lomba Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI.⁴ Sehingga dua desa wisata di Kabupaten Pinrang lolos yakni desa wisata Binanga Karaeng Kecamatan Lembang dan desa wisata Wiringtasi Kecamatan Suppa. Dengan hal ini bisa dilihat dari adanya potensi pariwisata di pesisir pantai di Kabupaten Pinrang banyak memiliki potensi yang besar munculnya objek wisata baru, namun hal ini tata kelola pariwisata oleh pemerintah belum mendapatkan

²Soebagyo, *Strategi Pengembangan Pariwisata di Indonesia* (Jakarta Selatan: Fakultas Ekonomi Universitas Pancasila, 2012), h. 153.

³Helln Angga Devy, Pengembangan obyek dan daya tarik wisata alam sebagai daerah tujuan wisata di Kabupaten Karanganyar (Surakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UNS, 2017) h. 35.

⁴Rudi Hartono, *Akhirnya Dua Desa Asal Pinrang Lolos Terdaftar ADWI 2021* (Kabar Pinrang Terbit 17.07.2021)

perhatian yang pada dasarnya masyarakat membutuhkan bantuan motivasi kebijakan pemerintah dalam membentuk objek wisata baru termasuk desa wisata.

Namun dalam pengelolaan dari desa wisata yang ada di Desa Binanga KaraengLembang ini masih ditemui beberapa permasalahan terkait pengoptimalan dan bagaimana strukturisasi setiap tempat belum terarah dengan baik. Berdasarkan observasi awal penelitian ini menemukan beberapa permasalahan dalam proses optimalisasi dan tata kelola di desa wisata binanga karaeng. *Pertama*, penempatan lahan parkir yang tidak menentu, sehingga merusak estetika dari pemandangan desa wisata. *Kedua*, permasalahan kedua adalah masyarakat belum sadar sepenuhnya bagaimana mengelola sampah. *Ketiga*, Pelayanan yang diberikan kurang baik, sehingga permasalahan ini membuat pengunjung yang datang menjadi tidak respect terhadap hal tersebut.

Dalam pengembangan desa wisata harus dilakukan melalui perencanaan dan aplikasi aktivitas kepariwisataan sesuai keanekaragaman, keunikan serta kekhasan tradisi seni budaya kearifan lokal setempat dan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup disekitarnya.

Destinasi pariwisata termasuk desa wisata terbentuk dari susunan ruang, sosial dan budaya serta sumber daya pariwisata yang saling erat hubungannya saling melengkapi dengan tujuan terciptanya pengalaman berwisata, sebab pada dasarnya seseorang ingin berwisata seharusnya membentuk kesan dan pengalaman berwisata yang berkualitas. Oleh karena itu pengembangan destinasi wisata (Desa Wisata) ini perlu dilakukan melalui campur tangan dari sejumlah stakeholder sehingga bertujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan intensitas kegiatan pariwisata.

Pada hakikatnya wilayah merupakan pemilik destinasi yang sesungguhnya. Bagi sebagian daerah pengembangan pariwisata akan mampu menyampaikan dampak pada meningkatnya perekonomian masyarakat, tersedianya lapangan pekerjaan dikarenakan di setiap satu kunjungan wisatawan bisa memberikan 1,5 tenaga kerja, lalu tersedianya sumber penghasilan pajak daerah, tumbuh dan munculnya ekonomi keratif, meningkatnya kepedulian masyarakat akan kelestarian dan kebersihan lingkungan. Pada dasarnya potensi alam dan budaya serta letak geografis yang relatif strategis akan mampu ditawarkan kepada wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang pastinya harus dilakukan sentuhan dan tata kelola yang profesional serta layak dikunjungi. Dalam hal potensi kunjungan yang baik jika mempunyai kualitas, maka dari itu kualitas tersebut secara khusus yaitu mempunyai kualitas objek wisata, apakah mempunyai kelayakan buat dikunjungi ataukah tidak, serta di dukung oleh beberapa unsur-unsur terpenting yang saling terikat serta tergantung yaitu, antraksi, fasilitas, infrastruktur, sistem transportasi dan pelayanan.

Tata Kelola Desa Wisata Di Desa Binanga Karaeng ini tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal jika tidak ada perhatian khusus dari berbagai pihak terkait yakni masyarakat, kelompok sadar wisata dan pemerintah daerah dalam membantu dan mewujudkan pengembangan desa wisata dalam mencapai tujuan yang telah menjadi prioritas pemerintah dan masyarakat sendiri yaitu bagaimana menjadi desa wisata yakni menjadi desa wisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan serta mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat. Dengan adanya Desa Wisata Binanga Karaeng ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara ekonomi kepada masyarakat dan pendapatan daerah, namun hal ini pengembangan dan penguatan desa wisata berbasis masyarakat dan pendampingan dari pemerintah daerah dan stakeholder terkait secara berkelanjutan maka seharusnya menjadi perhatian khusus sebagai desa wisata baru sehingga dengan ini kemudian juga menciptakan masyarakat yang mandiri. Maka dengan penelitian ini peneliti dapat menghasilkan manfaat yang baik terhadap proses pengolahan desa wisata ini dikarenakan suatu yang kompleks dan erat kaitannya dengan kedua konteks ini yakni pengoptimalan tata kelola yang berkualitas dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana Tata Kelola Desa Wisata Binanga Karaeng di Lembang (Perspektif Pariwisata Syariah), ini akan menjadi menarik untuk dikukuhnya penelitian tentang Tata Kelola Desa Wisata Binanga Karaeng Di Lembang Kabupaten Pinrang (Perspektif Pariwisata Syariah)

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang tujuannya untuk mendapatkan pemahaman secara mendalam tentang masalah-masalah sosial dan bukan mendeskripsikan sebagian permukaan dari suatu realitas.⁵ Serta menurut Denzin dan Lincoln bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada.⁶

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan data yang telah terkumpul, perlu dilakukan pengecekan keabsahan data. Pengecekan keabsahan data didasarkan pada kriteria derajat kepercayaan (*credibility*) dengan teknik triangulasi.

⁵Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 85

⁶Djama'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 24

3. Hasil dan Pembahasan

Desa Binanga Karaeng merupakan salah satu dari empat belas desa dan dua kelurahan yang ada di kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. Desa Binanga Karaeng terdiri dari dua desa yaitu dusun pajalele dan dusun salopi. Desa Binanga Karaeng adalah desa dataran rendah dengan sumber daya alam berupa pertanian, perkebunan dan perkapalan, berikut gambaran tentang sejarah perkembangan Desa Binanga Karaeng.

3.1 Hasil

Berdasarkan hasil wawancara peneliti yang dilakukan peneliti kepada lima informan di peroleh informasi, bahwa Tata kelola desa wisata binanga karaeng di lembang kabupaten pinrang mempunyai masing-masing pendapat tersendiri.

Partisipasi masyarakat

Adapun bentuk partisipasi masyarakat ada dua yaitu keterlibatan masyarakat dan keterlibatan pemerintah. Menurut saudara tamsil selaku masyarakat lokal sekaligus manajer segi teori salah satu tempat wisata yang ada di binanga karaeng, Mengatakan:

“Pemerintah tidak turut andil dalam tata kelola yang ada di wisata binanga karaeng lembang kabupaten pinrang tetapi ada beberapa tempat memang pemerintah sendiri yang mengelolanya, seperti tempat saya ini, di sebelahnya itu ada anggaran dana desa yang masuk, tetapi sebagian itu saya yang mengelolanya sendiri cuman tempat disini masih disewa dan lahan yang ditempati milik masyarakat lokal disini yang perbulannya disewa itu 500.000.00/bulan.”⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam pengembangan objek wisata Binanga Karaeng di Lembang Kabupaten Pinrang yaitu melakukan pembenahan infrastruktur maupun pengadaan sarana dan prasarana dalam pengembangan objek wisata Binanga Karaeng. Sarana pariwisata merupakan salah satu hal dasar dalam pengembangan pariwisata. Sarana dan prasarana yang di kawasan wisata membuat para pelancong tidak ragu untuk mengunjungi destinasi wisata tersebut sedangkan untuk partisipasi masyarakat merupakan wujud dari kesadaran dan kepedulian serta tanggungjawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan kepariwisataan. Tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat terkait pembangunan kepariwisataan kepulauan banyak mensyaratkan adanya kepercayaan dan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam seluruh proses pembangunan kepariwisataan.

Menurut owner sunset palm salah satu tempat wisata di binanga karaeng, Mengatakan:

⁷Hasil wawancara dengan Tamsil (Manajer café segi teori sekaligus masyarakat lokal diLembang Kabupaten Pinrang), 16 Desember 2022

“Tata kelola desa wisata binanga karaeng di tempat saya ini, saya dan keluarga yang mengelolanya sendiri tetapi untuk lahannya itu saya masih sewa kepada masyarakat lokal disini”.⁸

Menurut pengelola café star wisata binanga karaeng salah satu tempat wisata di binanga karaeng, Mengatakan:

“Tata kelola disini itu beda-beda yang mengelolanya Karena setiap tempat ada yang mengelola tersendiri dan untuk tempat saya ini saya bangun sendiri dan saya kelola sendiri dan alhamdulillah untuk lahannya saya yang miliki sendiri jadi tidak ada lagi yang saya sewa.”⁹

Menurut kepala desa binanga karaeng, Mengatakan:

“ Tata kelola di wisata binanga karaeng memang masyarakat yang mengelolanya dan masing-masing ada yang mengelola tetapi di desa itu kami juga turut andil dalam pengembangan wisata di binanga karaeng karena baru- baru kami dari desa mengirim 13 gezebo untuk digunakan di lokasi”.¹⁰

Dari uraian yang dipaparkan oleh narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa wisata binanga karaeng di lembang kabupaten pinrang masing-masing tempat mempunyai pengelola masing-masing dan untuk pemerintah desa juga turut terlibat dalam tata kelola destinasi desa wisata binanga karaeng. Masyarakat hendaknya ikut serta dalam mengawasi ataupun mengontrol setiap pembangunan kepariwisataan yang ada dengan ikut terlibat dalam penentuan visi, misi dan tujuan pembangunan kepariwisataan, mengidentifikasi sumber-sumber daya yang akan dilindungi, dikembangkan dalam daya tarik wisata guna untuk pengelolaan dan pengembangannya, serta berpartisipasi dalam mengimplementasikan rencana dan program yang telah disusun sebelumnya.

Peneliti menilai bahwa adanya partisipasi masyarakat pada Tata Kelola Wisata Binanga Karaeng telah dimulai sejak Binanga Karaeng dijadikan sebagai destinasi pariwisata, perencanaan, program, pelaksanaan, hingga keikutsertaan mengawasi aktivitas pengelolaan pariwisata kepulauan banyak. Hal ini senada dengan penelitian yang menjelaskan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung tata kelola pariwisata meliputi keikutsertaan masyarakat membangun, memiliki dan mengelola langsung fasilitas wisata serta pelayanannya.

Secara keseluruhan Tata Kelola Wisata Binanga Karaeng di Lembang Kabupaten Pinrang telah sesuai dengan prinsip partisipasi masyarakat terkait. Namun dalam penerapan prinsip tersebut masih terkendala dengan beberapa permasalahan, yaitu terkait belum seluruhnya masyarakat diikutsertakan dalam proses penentuan visi misi dan tujuan pembangunannya karena ketidakjelasan informasi yang bisa

⁸ Hasil wawancara dengan Fatur Rahman (Owner sunset falm di Lembang Kabupaten Pinrang), 18 Desember 2022

⁹ Hasil wawancara dengan Tabu (Pengelola café star wisata Binanga Karaeng di Lembang Kabupaten Pinrang) 16 Desember 2022

¹⁰ Hasil wawancara dengan Ahmad (Kepala desa Binanga Karaeng di Lembang Kabupaten Pinrang), 22 Desember 2022

dilihat oleh masyarakat yang mengakibatkan hanya anggota masyarakat tertentu yang ikut serta dalam kegiatannya hingga proses pengawasannya.

Keterlibatan segenap pemangku kepentingan

Pemangku kepentingan destinasi pariwisata adalah pihak-pihak yang terkait dengan kepentingan terhadap destinasi pariwisata. Dalam industri pariwisata, pemangku kepentingan memegang peran penting bukan hanya dalam perencanaan, namun juga dalam implementasi dan kontrol pengelolaan pariwisata. Apabila pemangku kepentingan berhasil menjalankan perannya sesuai dengan fungsi dan wewenangnya, Maka pengembangan pariwisata tentunya akan berjalan dengan optimal dan menghasilkan dampak positif yang akan dirasakan bukan hanya bagi pemerintah pusat dan daerah, namun juga bagi masyarakat setempat.

Menurut Kepala bidang SDM pariwisata dan ekonomi kreatif dinas pariwisata kabupaten pinrang, mengatakan:

“ Kami memang tidak terlalu mengenal desa wisata binanga karaeng karena wisata tersebut swasta dan dikelola langsung oleh masyarakat binanga karaeng Karena di kabupaten pinrang ini dinas pariwisata mengelola langsung hanya 1 wisata yaitu wisata sulili selebihnya wisata yang ada di kabupaten pinrang masing-masing ada yang mengelola tetapi kami di dinas pariwisata setiap ada kegiatan pasti kami turut andil dalam kegiatan tersebut, dan kami akan tetap akan medampingi, melakukan pembinaan-pembinaan terkait bagaimana mengelola tempat wisata secara professional yang ada di desa wisata binanga karaeng di lembang kabupaten pinrang” .¹¹

Dari uraian yang dipaparkan oleh dinas pariwisata kabupaten pinrang tersebut dapat disimpulkan bahwa dinas pariwisata akan terus turut andil dalam pengembangan pariwisata di kabupaten pinrang termasuk di wisata binanga karaeng karena pemangku kepentingan utama dalam pengembangan pariwisata di daerah adalah dinas pariwisata sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dinas pariwisata memiliki fungsi dan wewenang dalam mengembangkan potensi wisata di daerahnya, dan tentu harus mempunyai perencanaan yang matang dalam mengembangkan pariwisata serta menjalankan kebijakan pariwisata secara optimal. Namun demikian, dinas pariwisata tentu saja seharusnya juga mampu menciptakan koordinasi dan kolaborasi dengan pihak-pihak kepariwisataan. Peran pemangku kepentingan dibutuhkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan kepariwisataan, salah satu pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan kepariwisataan adalah pemerintah namun pemerintah memiliki keterbatasan.

Kemitraan Kepemilikan Lokal

¹¹ Hasil wawancara dengan H. Asdar S.E (Kepala bidang SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif dinas kabupaten Pinrang), 28 Desember 2022

Pembangunan kepariwisataan harus bisa memberikan kesempatan lapangan pekerjaan yang berkualitas serta menguntungkan untuk masyarakat setempat serta sesuai dengan kemampuannya.

Menurut kepala desa binanga karaeng di lembang kabupaten pinrang, Mengatakan:

“Pembangunan pariwisata desa binanga karaeng ini Dapat menambah perekonomian masyarakat kemudian adapun beberapa masyarakat yang tidak mempunyai kegiatan bisa terpanggil untuk menjadi pelayan café di wisata binanga karaeng”.¹²

Menurut masyarakat dan pengelola café star desa wisata binanga karaeng, Mengatakan”

“Peran tempat wisata dalam mendorong perekonomian masyarakat lokal sangat penting karena disamping pengelola berpenghasilan begitupun masyarakat lokal disini berpenghasilan juga”.¹³

Menurut owner sunset falm desa wisata binanga karaeng juga mengatakan:

“ Peran tempat wisata dalam mendorong perekonomian masyarakat lokal ini penting karena jika kita kerja sama dengan pemerintah setempat itu kita bisa sumbang juga dan ada partisipasi tersendiri untuk desa”.¹⁴

Dari beberapa wawancara dari narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa kemitraan kepemilikan lokal di desa wisata binanga karaeng ini dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal dan itu sangat penting karena masyarakat lokal dapat menambah penghasilan dari adanya wisata tersebut.

Kemitraan atau partnership dapat diartikan sebagai hubungan antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan bersama. Prinsip kemitraan kepemilikan lokal dalam Tata Kelola Wisata Binanga Karaeng terlihat jelas dari berbagai usaha dan kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pelaku usaha dan beberapa pihak swasta. Meskipun dalam penerapan prakteknya masih belum optimal. Hal ini dikarenakan tidak secara keseluruhan masyarakat pada umumnya merasakan kebermanfaatan atau dampak dari kemitraan tersebut. Kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah daerah juga masih seperti penitipan alat-alat penunjang pariwisata kepada beberapa pelaku usaha dan bisnis untuk disewakan kepada wisatawan. Kemitraan disini juga belum mampu mendorong munculnya kepemilikan lokal dari berbagai usaha fasilitas penunjang pariwisata di Wisata Binanga Karaeng.

Pemanfaatan Sumber Daya Secara Berlanjut

¹² Hasil wawancara dengan Ahmad (Kepala desa Binanga Karaeng di Lembang Kabupaten Pinrang), 22 Desember 2022

¹³ Hasil wawancara dengan Tabu (Pengelola café star wisata Binanga Karaeng di Lembang Kabupaten Pinrang) 16 Desember 2022

¹⁴ Hasil wawancara dengan Fatur Rahman (Owner sunset falm di Lembang Kabupaten Pinrang), 18 Desember 2022

Pariwisata berkelanjutan merupakan pengembangan konsep berwisata yang dapat memberikan dampak jangka panjang, baik itu terhadap sosial, budaya, serta ekonomi untuk masa kini dan masa depan bagi masyarakat lokal maupun wisatawan. Kegiatan pembangunan kepariwisataan harus memberikan jaminan bahwa sumber daya alam maupun buatan dapat dipelihara, dijaga, dirawat, dan diperbaharui dengan menggunakan metode-metode, kriteria-kriteria dan standar-standar internasional yang baku.

Menurut kepala bidang SDM pariwisata dan ekonomi kreatif dinas pariwisata kabupaten pinrang, Mengatakan:

“Tata kelola destinasi wisata di wisata binanga karaeng itu yang menjadi kendala yaitu persoalan akses jalan kemudian lampu penerangan jika malam karena wisata binanga karaeng ini berpotensi sebagai wisata area artinya bisa menjadi tempat persinggahan istirahat jika malam selanjutnya itu terkait kesadaran ide masyarakat dan pengelola yang masih agak kurang dalam mengelola wisata binanga karaeng dan yang terakhir yaitu masalah persoalan anggaran”.¹⁵

Menurut Kepala desa wisata binanga karaeng di lembang kabupaten pinrang, Mengatakan:

“Yang menjadi kendala dalam tata kelola destinasi wisata binanga karaeng sampai saat ini sudah 3 tahun berdiri yaitu tidak mempunyai PAD (Pendapatan Asli Desa) jadi saya katakan disini bahwa sepeserpun , satu sen pun, uang yang ada di wisata binanga karaeng ini belum ada yang masuk di desa”.¹⁶

Dari wawancara narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa akses jalanan perlu diperbaiki kedepannya agar wisatawan yang berkunjung dapat puas dengan wisata yang ada di binanga karaeng, selanjutnya terkait lampu penerangan pada malam hari, sebaiknya pemerintah memperhatikan setiap jalan untuk penerangan dan untuk masalah anggaran dana yang ada di wisata binanga karaeng ini sangat minim seharusnya pemerintah memperhatikan anggaran dana sehingga wisata binanga karaeng ini dapat dikelola dan ditata sebagai destinasi yang mendunia, Pengembangan pariwisata berkelanjutan dimaksudkan agar tidak ada lagi pembangunana destinasi wisata yang semata-mata hanya berfokus untuk menarik pengunjung sebanyak- banyaknya, tanpa memperhitungkan dampak yang diakibatkan. Setiap proses pembangunan hendaknya diarahkan untuk menghasilkan apa yang telah direncanakan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia sebaik mungkin. Pembangunan kepariwisataan seharusnya dapat menggunakan sumber daya yang dibutuhkan secara berlanjut, yang artinya kegiatan-kegiatannya harus menghindari sumber daya yang tidak dapat diperbaharui secara berlebihan. Dalam

¹⁵ Hasil wawancara dengan H. Asdar S.E (Kepala bidang SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif dinas kabupaten Pinrang), 28 Desember 2022

¹⁶ Hasil wawancara dengan Ahmad (Kepala desa Binanga Karaeng di Lembang Kabupaten Pinrang), 22 Desember 2022

pelaksanaan program kegiatan pembangunan kepariwisataan harus menjamin bahwa sumber daya dapat dipelihara dan diperbaiki.

Pemanfaatan sumber daya dalam Tata Wisata Binanga Karaeng berdasarkan hasil penelitian meliputi pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya budaya, sumber daya minat khusus dan sumber daya modal. Hal tersebut sejalan dengan pemaparan Pitana dan Diarta yang menjelaskan bahwa sumber daya dalam pariwisata diartikan sebagai sesuatu yang secara langsung maupun tidak langsung mempunyai potensi untuk dikembangkan guna mendukung pariwisata. Lebih lanjut Pitana dan Diarta menyampaikan bahwa sumber daya yang terkait dengan pengembangan pariwisata umumnya berupa sumber daya alam, sumber daya budaya, sumber daya manusia dan sumber daya minat khusus.

Mengakomodasikan Aspirasi Masyarakat Lokal

Aspirasi serta tujuan masyarakat setempat hendaknya mampu diakomodasikan ke dalam acara aktivitas kegiatan kepariwisataan agar kondisi yang harmonis dan tentram antara pengunjung/wisatawan, pelaku usaha dan masyarakat setempat dapat diwujudkan dengan baik. Aspirasi dan tujuan masyarakat setempat hendaknya dapat diakomodasikan dalam program kegiatan kepariwisataan, agar kondisi yang harmonis antara pengunjung, pelaku usaha, dan masyarakat setempat terwujud dengan baik mulai dari tahapan perencanaan, manajemen, sampai pada pemasaran. Berdasarkan pemaparan tersebut maka tercapainya prinsip mengakomodasikan aspirasi masyarakat dapat dinilai dari ada atau tidaknya upaya untuk menampung, menyalurkan dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Prinsip mengakomodasikan aspirasi masyarakat meskipun telah diterapkan namun masih kurang optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya informasi yang didapat oleh masyarakat untuk ikut terlibat dalam menyampaikan aspirasinya pada aktor pembuat kebijakan mengakibatkan hanya anggota masyarakat tertentu saja yang bisa menyampaikannya. Disamping itu masih rendahnya keaktifan masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya.

Menurut masyarakat lokal dan pengelola segi teori salah satu tempat wisata di binanga karaeng, Mengatakan:

“Kami perlu bantuan dari pemerintah setempat untuk membantu kami sebagai pengelola dalam mengembangkan desa wisata yang ada di binanga karaeng ini”.¹⁷

Dari wawancara dari salah satu masyarakat lokal tersebut dapat disimpulkan bahwa aspirasi masyarakat lokal hendaknya mampu diakomodasikan karena kolaborasi dalam pengembangan atraksi wisata budaya atau daerah mampu terselenggara dengan baik. Aspirasi dan tujuan masyarakat setempat hendaknya

¹⁷Hasil wawancara dengan Tamsil (Manajer café segi teori sekaligus masyarakat lokal diLembang Kabupaten Pinrang), 16 Desember 2022

dapat diakomodasikan dalam program kegiatan kepariwisataan, agar kondisi yang harmonis antara pengunjung, pelaku usaha, dan masyarakat setempat terwujud dengan baik mulai dari tahapan perencanaan, manajemen, sampai pada pemasaran. Berdasarkan pemaparan tersebut maka tercapainya prinsip mengakomodasikan aspirasi masyarakat dapat dinilai dari ada atau tidaknya upaya untuk menampung, menyalurkan dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Prinsip mengakomodasikan aspirasi masyarakat meskipun telah diterapkan namun masih kurang optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya informasi yang didapat oleh masyarakat untuk ikut terlibat dalam menyampaikan aspirasinya pada aktor pembuat kebijakan mengakibatkan hanya anggota masyarakat tertentu saja yang bisa menyampaikannya. Disamping itu masih rendahnya keaktifan masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya.

Daya Dukung Lingkungan

Daya dukung lingkungan merupakan suatu alat perencanaan pembangunan yang memberikan gambaran hubungan antara penduduk, penggunaan lahan dan lingkungan

Menurut owner sunset palm salah satu tempat wisata di binanga karaeng, Mengatakan:

“Daya dukung lingkungan disini digunakan dengan baik karena lingkungan ini atau lahan ini saya sewa kepada pemilik lokal disini kemudian saya yang mengembangkan dengan cara membuat sebuah café yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung karena disuguhkan dengan keindahan alam dan keindahan yang kami buat sendiri yaitu menyediakan musik, tempat foto dll”.¹⁸

Menurut pengelola café star salah satu wisata di binanga karaeng juga mengatakan:

“Lingkungan disini memang patut kita jadikan wisata karena melihat dari keindahan alamnya yang sangat sejuk ditambah kita bisa melihat pantai dan sangat cocok dijadikan sebagai tempat refreshing, tinggal kita sebagai masyarakat disini bekerja sama dengan pemerintah bagaimana cara mengembangkan wisata tersebut dan kebetulan lahan ini saya yang punya jadi saya membuat sebagai wisata dengan cara membangun sebuah gazebo dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas penunjang untuk menarik wisatawan seperti tersedianya karaoke, banana boat, tersedianya permainan anak dan orang tua yaitu mobil-mobilan, tersedia juga katinting jika ingin melihat keindahan pantai, tempat foto, mushollah dan juga kami menyediakan tempat penginapan bagi wisatawan luar maupun dalam daerah”.¹⁹

Dari beberapa wawancara narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa daya dukung lingkungan di wisata binanga karaeng di lembang kabupaten pinrang ini memiliki daya dukung lingkungan yang baik untuk

¹⁸Hasil wawancara dengan Fatur Rahman (Owner sunset palm di Lembang Kabupaten Pinrang), 18 Desember 2022

¹⁹Hasil wawancara dengan Tabu (Pengelola café star wisata Binanga Karaeng di Lembang Kabupaten Pinrang) 16 Desember 2022

dikembangkan karena melihat dari keindahan alam dan akses yang cukup mudah dijangkau dan strategis selain itu wisata Binanga Karaeng juga sudah berpedoman pada 7 sapta pesona pariwisata yaitu keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, keramahan dan kenangan. Sunaryo menyampaikan bahwa pertimbangan utama yang harus dijadikan dalam mengembangkan berbagai fasilitas dan kegiatan kepariwisataan meliputi daya dukung fisik, biotik, sosial-ekonomi, dan budaya. Sunaryo juga menjelaskan bahwa pembangunan dan pengembangan harus sesuai dan serasi dengan batas-batas kapasitas lokal dan daya dukung lingkungan yang ada.

Hasil penelitian tentang Analisis Wisata Syariah Terhadap Wisata Binanga Karaeng Di Lembang Kabupaten Pinrang

Analisis wisata syariah adalah mengamati aktivitas objek wisata dengan cara mendiskripsikan komposisi objek wisata dan menyusun kembali komponen- komponennya untuk dikaji atau dipelajari secara detail. Pengembangan kepariwisataan merupakan upaya mendorong kegiatan kepariwisataan untuk menciptakan kondisi usaha pariwisata yang dapat menghasilkan devisa negara. Pengembangan pariwisata, terutama pembangunan wisata Binanga Karaeng, jauh lebih luas dibandingkan dengan modifikasi objek wisata alam dan bahari, serta pengembangan akomodasi dan restoran. Wisatawan yang datang masih membutuhkan sarana transportasi, tempat wisata air yang menarik, pelayanan oleh suasana yang aman dan masih banyak lagi. Pengembangan pariwisata dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah dan sebagai sarana pelestarian budaya dan kearifan daerah. Lihatlah berbagai kemungkinan wisata yang terdapat di kota Pinrang, khususnya wisata Binanga Karaeng. Kota sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam pembangunan pariwisata harus dapat mengoptimalkan kemungkinan tersebut untuk kesejahteraan masyarakat sekitar.

Menurut kepala bidang SDM pariwisata dan ekonomi kreatif dinas kabupaten pinrang, Mengatakan:

“Analisis wisata syariah di wisata binanga karaeng jika diamati memang memiliki objek wisata yang syariah karena dilihat dari pelayanannya dan tempat- tempat ibadah yang sudah ada di wisata tersebut”.²⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa wisata syariah adalah kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas dan layanan yang sesuai dengan syariah yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha negara, dan pemerintah kota. Banyak orang menggunakan wisata syariah karena kualitas produk dan layanannya yang universal. Produk dan jasa pariwisata, destinasi dan destinasi dalam pariwisata syariah

²⁰ Hasil wawancara dengan H. Asdar S.E (Kepala bidang SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif dina kabupaten Pinrang), 28 Desember 2022

sama dengan produk, jasa, destinasi dan destinasi pariwisata pada umumnya, sepanjang tidak bertentangan dengan nilai dan etika syariah. Jadi wisata syariah tidak terbatas pada wisata religi saja. Selain tempat wisata, fasilitas penunjangnya harus memenuhi standar Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI). Wisata syariah bukan hanya wisata ziarah Bicara tentang wisata syariah bukan hanya wisata religi atau ziarah saja, melainkan implementasinya yang mengutamakan pelayanan berdasarkan standar halal bagi umat Islam, seperti: Menyediakan makanan halal dan tempat ibadah. Informasi tentang masjid terdekat dan tidak adanya minuman beralkohol di hotel tempat wisatawan menginap.

Pengembangan kepariwisataan merupakan upaya mendorong kegiatan kepariwisataan untuk menciptakan kondisi usaha pariwisata yang dapat menghasilkan devisa negara. Pengembangan pariwisata, terutama pembangunan wisata Binanga Karaeng, jauh lebih luas dibandingkan dengan modifikasi objek wisata alam dan bahari, serta pengembangan akomodasi dan restoran. Wisatawan yang datang masih membutuhkan sarana transportasi, tempat wisata air yang menarik, pelayanan oleh suasana yang aman dan masih banyak lagi. Pengembangan pariwisata dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah dan sebagai sarana pelestarian budaya dan kearifan daerah. Lihatlah berbagai kemungkinan wisata yang terdapat di kota Pinrang, khususnya wisata Binanga Karaeng. Kota sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam pembangunan pariwisata harus dapat mengoptimalkan kemungkinan tersebut untuk kesejahteraan masyarakat sekitar.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan kepala desa binanga karaeng di lembang kabupaten pinrang, Mengatakan:

“Objek wisata di binanga karaeng sudah bisa dikatakan sebagai wisata syariah karena mengingat tempat pelayanan, makanan, minuman, dan tempat-tempat ibadah yang sudah ada di beberapa tempat, selain itu untuk pelayan setiap warung-warung itu pastinya menutup aurat sesuai dengan syariat islam”.²¹

Dari wawancara narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa analisis wisata pada destinasi wisata binanga karaeng di lembang kabupaten pinrang sudah bisa dikatakan sebagai wisata syariah karena mengingat jawaban dari narasumber diatas mengatakan bahwa tempat-tempat ibadah, pelayanan, makanan dan minuman sudah memenuhi syariat islam. Menurut kementrian Pariwisata dan Industri Kreatif dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, kriteria standar yang berlaku untuk pariwisata syariah sebagai berikut:

²¹ Hasil wawancara dengan Ahmad (Kepala desa Binanga Karaeng di Lembang Kabupaten Pinrang), 22 Desember 2022

Berorientasi pada kemaslahatan umum, pariwisata syariah mengarahkan pelaku wisata seperti hotel dan sejenisnya menjaga norma-norma agama didalam pengelolaannya seperti menyediakan tempat ibadah yang nyaman, menyediakan makanan halal dan layanan halal lainnya.

Berorientasi pada pencerahan, penyegaran dan ketenangan, Pariwisata dengan konsep syariah memberikan keamanan dan ketertiban sehingga wisatawan dan kegiatan pariwisata pada umumnya tetap memelihara kelestarian jiwa manusia. Seperti tidak menyediakan kegiatan-kegiatan yang menimbulkan bahaya atau dharar pada jiwa.

Menghindari kemusyrikan dan khurofat, Kehadiran pariwisata syariah pada dasarnya dapat memperkuat makna halal dalam melakukan wisata sesuai tuntunan prinsip syariah. sekaligus melindungi keyakinan wisatawan agar terjauh dari kemusyrikan dan khurafat.

Menghindari maksiat, seperti zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi, Prinsip pariwisata syariah melindungi wisatawan dari kemaksiatan yang sekarang ini banyak terjadi dan berkembang di tengah masyarakat yang tentu saja kontraproduksi dengan yang di ajarkan dalam Islam. Sebab itu untuk menjauhkan wisatawan dari kemaksiatan itu dalam konsep wisata Syariah antara lain perlu dihadirkan hotel-hotel yang bersertifikat halal, pantai berbasis syariah yang menyediakan pembatas permanen untuk turis perempuan dan laki-laki.

Menjaga perilaku, etika dan nilai luhur kemanusiaan seperti tidak bersikap hedonis dan asusila, wisatawan harus menjaga sikap seperti tertawa dan bercanda sesuai dengan batasan, saling menghormati sesama wisatawan.

Menjaga amanah, keamanan dan kenyamanan, Prinsip pariwisata syariah melindungi wisatawan dari kemaksiatan yang sekarang ini banyak terjadi dan berkembang di tengah masyarakat yang tentu saja kontraproduksi dengan yang di ajarkan dalam Islam. Sebab itu untuk menjauhkan wisatawan dari kemaksiatan itu dalam konsep wisata Syariah antara lain perlu dihadirkan hotel-hotel yang bersertifikat halal, pantai berbasis syariah yang menyediakan pembatas permanen untuk turis perempuan dan laki-laki.

Bersifat universal dan inklusif, Pariwisata dengan konsep syariah bersifat umum artinya penyediaan konsep syariah bukan hanya untuk wisatawan Muslim saja namun wisatawan nonmuslim juga bisa menikmati fasilitas yang disediakan.

Menjaga kelestarian lingkungan, yang tidak kalah penting dari pariwisata syariah bagaimana menciptakan lingkungan yang bersih terutama dari sampah. Kekurangan destinasi wisata di Indonesia yang tergambarkan oleh wisatawan tidak bersih dan tidak terawat. Salah satunya toilet.

Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan, setiap wisatawan diharuskan untuk menghormati kebudayaan serta nilai-nilai sosial masyarakat disekitar lokasi wisata meskipun itu bertentangan dengan prinsip syariah. Karena, kebudayaan yang terdapat di Indonesia tidak hanya bersumber dari budaya Islam, akan tetapi beragam. Sehingga, satu sama lainnya harus saling menghormati walaupun berbeda agama dan kepercayaan.²²

Pola manajemen dari penyelenggaraan pembangunana kepariwisataan yang berlanjut serta berwawasan lingkungan akan bisa dengan mudah dikenali melalui berbagai ciri penyelenggaraan yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah sebagai berikut:

Kemitraan kepemilikan lokal

Pada dasarnya kemitraan usaha bukanlah penguasaan yang satu atas lainnya melainkan menjamin kemandirian pihak-pihak yang bermitra. Hal yang terpenting dari suatu kemitraan hendaknya ada keseimbangan artinya hak dan kewajiban masing-masing pihak yang bermitra jangan sampai berat sebelah. Dalam prakteknya, kemitraan bisnis kuliner makanan dan minuman di wisata desa binanga karaeng lembang ini masih dirasakan berat sebelah, kurang menguntungkan bagi pihak mitra. Kekuasaan sepenuhnya ada di tangan pihak masyarakat lokal yang punya lahan mulai dari menentukan sewa kepada mitra.

Dalam kondisi semacam ini, keberadaan mitra seperti tidak mempunyai kekuatan tawar menawar (bargaining power) yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakadilan. Pada dasarnya, Islam melarang semua bentuk transaksi yang akan menimbulkan kesulitan dan masalah terutama mengenai hak-hak semua pihak yang bermitra dalam bisnis tidak dilaksanakan secara sepihak. Hal ini, memungkinkan sebagian dari pihak yang bermitra dapat memperoleh keuntungan namun dengan merugikan pihak lain.

Hubungan kemitraan yang efektif memotivasi pihak yang bermitra untuk memperoleh tujuan yang harmonis dan menjaga kepentingan masing-masing. Berbisnis bukan hanya mencari keuntungan materi semata, tetapi didasari rasa keadilan dimana hak dan kewajiban masing-masing pihak harus seimbang jangan sampai berat sebelah. Islam mengajarkan untuk menjamin hak-hak individu, menjaga solidaritas sosial dan untuk menerapkan nilai moralitas yang tinggi dalam dunia bisnis. Transaksi bisnis tidak dibiarkan begitu saja menurut apa maunya individu, tetapi lewat ajaran-ajaran moralnya Islam melalui Al-Qur'an dan Hadits.

Pemanfaatan sumber daya secara berlanjut

²²Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. *Kriteria dan Panduan Umum Pariwisata Syariah*. h. 7.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi wisata dalam mengelola pariwisata, yaitu atraksi termasuk pertunjukan budaya yang menarik wisatawan, dan pentingnya infrastruktur penunjang seperti jalan, ketersediaan transportasi, dan integrasi antar destinasi, dan konektivitas, amenities yakni tersedianya akomodasi, memperhatikan kebersihan, fasilitas sekitar destinasi. Selain itu sangat penting sumber daya manusia yang menjadi kunci penggerak pariwisata sebagai pendukung perluasan dan percepatan ekonomi, satu wisatawan mancanegara dapat menyerap tenaga kerja lebih dari satu orang, misalkan pemandu wisata, dan yang lainnya.

Makanan yang disajikan di cafe harus halal. Semua hewan harus disembelih sesuai dengan prinsip Islam. Adapun kebutuhan wisatawan sesuai dengan prinsip syariah sebagai berikut:

- 1) Minuman beralkohol tidak boleh disajikan di tempat.
- 2) Layanan makanan yang halal
- 3) Fasilitas Sholat
- 4) Fasilitas Kamar mandi
- 5) Terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan.

Secara sederhana wisata halal didefinisikan sebagai upaya untuk memberikan layanan dan fasilitas untuk wisatawan Muslim agar lebih nyaman dalam melakukan kegiatan wisata. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pariwisata halal sangat memperhatikan kebutuhan wisatawan Muslim. Namun, layanan dan fasilitas wisata halal tidak hanya diperuntukkan bagi wisatawan Muslim, wisatawan non-Muslim pun dapat menikmatinya. Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim sangat pantas dan mudah untuk mengembangkan segmen wisata ini sebagai alternatif untuk menarik kunjungan wisatawan karena dilihat dari peluang dan potensinya sangat besar, nah dari hasil penelitian sesuai dengan kebutuhan wisatawan yang halal itu di realisasikan di wisata binanga karang kecamatan lembang, sesuai dengan prinsipnya

Mengakomodasikan aspirasi masyarakat lokal

Nah seperti yang terjadi di wisata binanga karaeng masyarakat lokal diberikan ruang untuk berbisnis di kawasannya sendiri sehingga sangat menguntungkan bagi mereka yang menjual makanan dan minuman, kemudian membuat atraksi seperti banana boat bagi para pengunjung yang datang berwisata sehingga menguntungkan bagi pengelola destinasi wisata dan masyarakat lokal karena menghadirkan pengunjung yang begitu meriah karena tanpa adanya aspirasi masyarakat lokal yang membuat suatu atraksi misal, itu tidak menutup kemungkinan masyarakat tidak berdatangan karena tidak ada yang meriah.

Daya Dukung Lingkungan

Standar destinasi syariah merupakan salah satu standart yang menjadi tolak ukur suatu wilayah sehingga menjadi salah satu destinasi pariwisata yang dapat dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Standart destinasi syariah ini berkarakteristik memiliki objek pariwisata Islami, keamanan wisatawan, masyarakat yang kooperatif terhadap pelaksanaan pariwisata syariah serta tersedianya fasilitas yang menunjang disekitar objek pariwisata yang terawat dengan baik. Apabila secara lingkungan kriteria tersebut telah terpenuhi, perwakilan dari tokoh masyarakat serta pemerintah daerah bisa melakukan musyawarah bersama untuk merumuskan peraturan baik peraturan daerah maupun wisdom (kebijaksanaan setempat) untuk mengatur wisatawan yang datang dengan masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat sepuluh fasilitas pendukung di Pantai salopi desa binanga karaeng yang masih belum memadai yaitu penginapan, tour and travel, pramuwisata belum ada, cinderamata tidak ada, dan kelembagaan belum terstruktur atau terpusat. Dari segi atraksi, pantai salopi memiliki beragam potensi atraksi yang dapat disajikan mulai dari atraksi alam, atraksi budaya, atraksi buatan, hingga atraksi edukasi. Saat ini atraksi yang telah disuguhkan baru mengandalkan atraksi alam dan atraksi buatan yaitu dengan menampilkan latar pantai salopi dan keindahan laut ketika sun rise dan sun set. Atraksi buatan yang ditonjolkan yaitu beberapa spot foto baik dari payung-payung yang ada di pesisir pantai hingga mural yang ada di perumahan warga. Sedangkan ada beberapa potensi atraksi yang dapat disajikan seperti acara edukasi penangkaran penyu, edukasi proses pembuatan selai atau jenang dodol, dan wisata wahana air. Meskipun di wisata binanga karaeng tidak memiliki objek pariwisata yang islami, akan tetapi nilai religius yang ditonjolkan menjadi daya tarik tersendiri dengan memperhatikan prinsip syariah. Selain itu di wisata binanga araeng juga sudah dilengkapi dengan fasilitas ibadah yang suci dan layak.

Penginapan di wisata binanga karaeng sudah ada berupa mini homestay yang berjumlah 5 rumah. Akan tetapi ada beberapa fasilitas yang belum disediakan seperti petunjuk arah kiblat dan sertifikasi halal. Untuk tempat makan terdapat sepuluh warung tenda yang menyediakan makanan ringan dan minuman kemasan tanpa menyediakan makanan atau minuman haram. Sedangkan untuk tour and travel, pramusaji, dan cinderamata sampai penelitian ini dilakukan masih belum disediakan.

Lokasi wisata Binanga Karaeng yang strategis dan dekat dengan perbatasan sulbar dan sulsel membuat wisatawan mudah untuk mengunjungi wisata Binanga Karaeng dengan menggunakan alat transportasi apapun dan dengan harga yang terjangkau. Meskipun sistem pendukung sertifikasi halal di wisata Binanga Karaeng belum ada, akan tetapi promosi yang dilakukan oleh pemerintah sudah melalui media sosial dan website serta dengan branding yang tepat. Seluruh pengoperasionalan yang ada di wisata

Binanga Karaeng juga sudah memberdayakan masyarakat lokal sebagai pelaku utama dalam menjalankan pariwisata.

Partisipasi Pemerintah dan Masyarakat

Pengembangan wisata Binanga Karaeng apabila di lihat dari persepsi masyarakat Binanga Karaeng baik masyarakat muslim, masyarakat non muslim di lihat dari destinasi alam Binanga Karaeng yang mengalami peningkatan, asseabilitas, akomodasi dan dukungan dari pemerintah daerah maka pemerintah binanga karaeng siap dengan adanya pengembangan wisata di binanga karaeng, hal ini di dukung oleh ketersediaan makanan halal, jumlah penginapan serta adanya kerjasama dari stakeholder. Dari unsur ketersediaan makanan halal, Binanga Karaeng siap menyajikan makanan halal hal ini karena jumlah penduduk muslim, dan budaya "gak neko-neko" maka dari unsur makanan maka wilayah Binanga Karaeng siap menyajikan makanan halal. Tetapi masih adanya kendala yaitu sebagian besar UMKM Makanan di Binanga Karaeng belum tahu adanya sertifikat halal, sehingga ini merupakan tantangan dari berbagai pihak terutama pemerintah daerah untuk lebih bekerja keras dalam mensosialisasi sertifikat halal dalam makanan. Dari unsur jumlah penginapan (Rumah Kecil) yang ada di wisata Binanga Karaeng, serta persepsi masyarakat baik muslim maupun non muslim, di simpulkan bahwa ponorogo dari sisi Akomodasi pembangunan dan penginapan di nilai belum siap. Sehingga perlu adanya kerjasama di semua unsur masyarakat, baik hal ini masyarakat Binanga Karaeng sendiri sebagai obyek pengembangan wisata halal, ulama, akademisi dan pemerintah agar pariwisata Binanga Karaeng dapat terwujud, hal ini memerlukan waktu yang cukup lama, mengingat bahwa saat ini wisata Binanga Karaeng masih dalam taraf pengembangan destinasi wisata (Memperbanyak Destinasi Wisata).

4. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Tata Kelola Desa Wisata Binanga Karaeng di Lembang Kabupaten Pinrang, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan wisata Binanga Karaeng sudah berjalan sesuai dengan indikator tata kelola pariwisata yang berbasis syariah namun saat ini masih dalam tahap perencanaan dan pengembangan sehingga mampu menjadi salah satu wisata syariah khususnya di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. Faktor pendukung dalam pengelolaan objek wisata yaitu potensi daerah dan peran aktif dari masyarakat sehingga dapat mengembangkan dan membangun objek wisata Binanga Karaeng yang lebih baik dan dapat menarik perhatian wisatawan. Sedangkan faktor penghambat dalam Tata Kelola Pariwisata wisata Binanga Karaeng yaitu sarana dan prasarana yang

belum memadai dan keterbatasan anggaran sehingga menghambat dalam proses pengembangan objek wisata Binanga Karaeng Di Lembang Kabupaten Pinrang.

Referensi

Al-Qur'an Al karim

Aan komariah dan Djama'an Satori, 2017. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta

Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, Metode Penelitian, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005).

Arikunto, Suharismi . 1995. Dasar-dasar Research, Bandung: Tarsito

Bagus Sudibya, 2018. Wisata Desa dan Desa Wisata, bali membangun bali jurnal bappeda litbang

Bambang, Sunaryo, 2013. Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta : Gava Media.

Bawazir Tohir, 2013. Panduan Praktis Wisata Syariah, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Damin Sudarman, 2012. Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humnsiora, Bandung: Pustaka Setia.

Darsono. 2005. Pengertian Desa. <http://desasentonorejo.wordpress.com/bab-ii/> (diakses pada tanggal 22 Juni 2022)

Hermawan Hary, 2018. 'Metode Kualitatif Untuk Riset Pariwisata'. <https://osf.io/preprints/inarxiv/nyvug/>, (diakses pada tanggal 30 Mei 2022).

Kuncoro Mudrajad, 2013. Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi: Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis, Jakarta: Erlangga.

Matthew B, Miles, 1992. "Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode- Metode Baru/Matthew B, Miles dan A. Michael Huberman; penerjemah Tjejep Rohendi Rohidi", Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Moleong, Lexy J, 1993. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rodaskarya.

Nuyanti, Wiendu, 1993. concept, perspective, and challenge. Bagian dari laporan konferensi internasional mengenai pariwisata budaya. Yogyakarta : Gadjah mada university press.

Raco, 2010. ' Metode Penelitian Kualitatif'. Jakarta: PT GRASINDO. Gunawan Imam, 2015. Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik, Jakarta: Bumi Aksara.

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 10. Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.

Rosidi Imron, 2011. Karya Tulis Ilmiah, Surabaya: PT. Alfina Primatama.

Sodan amri dan M.rohman, 2012. Strategi dan Desain Pengembangan Sistem Pembelajaran. Prestasi Pustaka. Jakarta.

Soebagyo, 2012. Strategi Pengembangan Pariwisata di Indonesia. Jakarta Selatan: Fakultas Ekonomi Universitas Pancasila.

Sofiyan Riyanto, 2012. Prospek Bisnis Pariwisata Syariah, Jakarta:Republika. Sukmadinata M. Iqbal, 2002. Metode Penelitian dan Aplikasinya, Bogor: Ghia Indonesia.

Sunggono Bambang, 1997. Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wekke Ismail Suardi Wekke, dkk. 2019. Metode Penelitian Ekonomi Syariah, Yogyakarta: Gawe Buku.

Yudi yudiana dan Maulana Hamzah, Analisis Komparatif Potensi Industri Halal dalam Wisata Syariah dengan Konvensional